

Lampiran Peraturan Walikota Cimahi  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tentang Tatacara Penganggaran,  
Pelaksanaan, Penatausahaan,  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta  
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan  
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi

---

**KOP BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

---

Cimahi ,  
Yth. Walikota Cimahi  
cq . Kepala Dinas .....  
di -  
Cimahi

Nomor :  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan  
Pencairan/Penyerahan  
Dana Hibah/Bansos )\*  
Tahun.....

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Bapak Nomor ..... Tanggal ..... Perihal..... dan memperhatikan Keputusan Walikota Cimahi Nomor .... Tanggal Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah/Bansos Tahun Anggaran .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana /penyerahan barang dimaksud yang selanjutnya akan dipergunakan sesuai dengan proposal yang telah kami sampaikan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih .

**Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**  
**Ketua/Pimpinan**  
**Cap/ttd**  
**(Nama Jelas)**

\* pilih salah satu

Lampiran Peraturan Walikota Cimahi  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi

### CONTOH NASKAH

#### NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (HIBAH BARANG)

##### NOMOR :

Pada hari ini, ....., Tanggal .....Bulan ..... Tahun Dua Ribu .....yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Cimahi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :  
No. KTP :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan\* ..... yang berkedudukan di Jl. ....RT....RW.....Kelurahan .....Kecamatan ....., Kota Cimahi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

## JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan belanja hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa barang -----  
-----
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima belanja hibah dari **PIHAK PERTAMA** berupa barang .....
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk .....sesuai dengan proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk .....

## Pasal 2 PENYERAHAN HIBAH BARANG

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran ..... dilakukan secara langsung. Dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Merk Barang	Jumlah Barang	Spesifikasi Barang	Harga Barang
1. 2. dst					

- (2) Sebelum Penyerahan Hibah Barang sebagaimana dimaksud Pasal 2 **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri :  
-----
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; .....
  - b. Surat Pernyataan Bertanggung jawab Mutlak/Pakta Integritas.  
-----
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima hibah barang dari **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Proposal dan Peraturan prundang-undangan.  
-----
- (4) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah

**Pasal 3**  
**PENGGUNAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menggunakan belanja hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Proposal.  
-----
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan barang yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada Pihak Lain.  
-----
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor .....tanggal ..... tentang Penerima Bantuan Hibah pada APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran .....yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.  
-----

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan barang hibah yang telah diterima  
-----
- (2) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan barang dokumpentasi (foto) kegiatan dan Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan barang hibah yang telah ditandatangani oleh pimpinan Lembaga / Badan / Organisasi kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Januari 2017.  
-----
- (3) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
-----
- (4) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari **PIHAK KEDUA**.  
-----

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyerahkan barang hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**, dan dinyatakan lengkap dan benar

---

- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

---

- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan Proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;

---

**Pasal 6**  
**SANKSI**

**PIHAK KEDUA** yang melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa Peringatan tertulis dan Sanksi lain sesuai dengan peratyran perundang-undangan.

---

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

---

- (2) Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

---

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**(PENERIMA HIBAH)**

**(PEMBERI HIBAH(KEPALA SKPD))**

Lampiran Peraturan Walikota Cimahi  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan,  
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan  
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan  
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi

### CONTOH NASKAH

#### NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (HIBAH UANG)

##### NOMOR :

Pada hari ini, ....., Tanggal .....Bulan ..... Tahun Dua  
Ribu .....yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :  
Instansi :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Walikota Cimahi, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :  
No. KTP :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .badan/lembaga/organisasi  
kemasyarakatan\* ..... yang berkedudukan di Jl.  
.....RT....RW.....Kelurahan .....Kecamatan ....., Kota Cimahi, yang  
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah  
berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan belanja hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa uang sebesar .....
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan telah menerima belanja hibah dari **PIHAK PERTAMA** berupa uang sebesar .....dan untuk penerimaan uang tersebut oleh **PIHAK KEDUA** Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan atau kuitansinya.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiaya Kegiatan .....sesuai dengan proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (4) Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk .....

## Pasal 2

### PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan belanja hibah daerah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran ... dilakukan secara langsung.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah daerah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan dilampiri :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - b. Fotokopi Rekening yang masih aktif;
  - c. Surat Pernyataan Bertanggung jawab Mutlak/Pakta Integritas.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui Transfer oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Rekening .....Nomor Rekening .....pada Bank BJB atas nama .....
- (4) **PIHAK KEDUA** setelah menerima pencairan belanja hibah dari **PIHAK PERTAMA** segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Proposal dan Peraturan prundang-undangan.

### **Pasal 3**

#### **PENGGUNAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) dilakukan sesuai dengan Proposal.  
-----
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan belanja hibah yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada Pihak Lain.  
-----
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan untuk kegiatan dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Walikota Cimahi Nomor .....tanggal ..... tentang Penerima Bantuan Hibah pada APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran .....yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.  
-----
- (4) Untuk Belanja Hibah yang tidak digunakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Belanja Hibah tersebut kepada Kas Daerah pada Tahun Anggaran berjalan.

### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari belanja hibah daerah yang telah disetujui perundang-undangan yang berlaku. ....
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku. ....
- (3) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah daerah beserta bukti transaksi, dokumpentasi (foto) kegiatan dan Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang telah ditandatangani oleh pimpinan Lembaga / Badan / Organisasi kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (5) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka akan dikenakan sanksi hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari **PIHAK KEDUA**.  
-----

### **Pasal 5**



## HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban segera mencairkan dana belanja hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui evaluasi Pemerintahan Kota. ....
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;  
-----
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan Proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah; .....

### Pasal 6 SANKSI

**PIHAK KEDUA** yang melanggar Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, dapat dikenakan Sanksi Administratif berupa Peringatan tertulis dan Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ....

### Pasal 7 ADDENDUM

- (1) Dalam hal terdapat Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD), **PIHAK KEDUA** mengajukan perubahan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah;  
-----
- (2) Perubahan RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.  
-----

**Pasal 8**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hokum yang sama.
- 
- (2) Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.
- 

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**(PENERIMA HIBAH)**

**(PEMBERI HIBAH(KEPALA SKPD))**

DRAFT

DRAFT